



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI
BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGK adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai bukan bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3. Pegawai Bukan Bendahara adalah PNS, Anggota TNI/POLRI, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

4. Pihak yang merugikan adalah Pegawai Bukan Bendahara yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
5. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
6. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari pihak yang merugikan.
7. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
8. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
9. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencakup Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
10. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
11. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani penyelesaian Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

12. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
13. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Bukan Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri/Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Bagian Ketiga
Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Bukan Bendahara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Setiap Pegawai Bukan Bendahara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Informasi, Verifikasi dan Pelaporan Tata Cara Tuntutan Ganti
Kerugian Terhadap Pegawai Bukan Bendahara

Paragraf 1

Informasi

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat diketahui melalui:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;

- b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh:
 - 1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - 2) Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - 3) Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Laporan tertulis yang bersangkutan;
- d. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- e. Perhitungan *ex officio*; dan/atau
- f. Pelapor secara tertulis yang disampaikan oleh internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau suatu badan/lembaga yang memberikan informasi atau mengungkapkan adanya indikasi Kerugian Negara secara tertulis dan bertanggung jawab.

Paragraf 2

Verifikasi dan Pelaporan

Pasal 5

- (1) Atasan Langsung atau Kepala Satker wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Atasan Langsung atau Kepala Satker dapat menunjuk pegawai di lingkungan Satkernya untuk melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat perintah.
- (4) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Negara, Kepala Satker/Atasan Kepala Satker menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaporkan kepada Menteri; dan

- b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan,
untuk indikasi Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Satkernya.
- (6) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Pelaporan Kerugian Negara berdasarkan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal terdapat informasi tentang Kerugian Negara, Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyampaikan informasi tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan hasil pengawasan diterbitkan dan Kepala Satker untuk segera memastikan dan menindaklanjuti informasi Kerugian Negara tersebut.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Bukan Bendahara tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi, maka dalam laporan kepada Menteri dinyatakan adanya unsur pidana, sedangkan penyerahan perkaranya kepada aparat penegak hukum dilakukan setelah diperoleh petunjuk dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Sekretaris Jenderal.
- (3) Pegawai di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin ataupun pembebasan tugas dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 7

- (1) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Menteri selaku PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.
- (2) Kewenangan Menteri selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satker.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satker, kewenangan Menteri selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan Kepala Satker.

Bagian Ketiga
Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 8

- (1) Untuk penyelesaian Kerugian Negara, Kepala Satker atau atasan Kepala Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) membentuk TPKN yang ditetapkan dengan keputusan.
- (2) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

TPKN dibentuk untuk memproses penyelesaian Kerugian Negara dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Pasal 10

- (1) TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota TPKN yang berasal dari Satker di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. Ketua minimal pejabat/pegawai yang setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara;
 - b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara.
- (3) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat/pegawai dalam menyelesaikan Kerugian Negara, keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pejabat/pegawai dari Satker lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (4) Pembentukan TPKN ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Satker/Atasan Kepala Satker atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku PPKN.
- (5) Pembentukan TPKN ditetapkan untuk tiap-tiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran nilai Kerugian Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 11

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN memiliki tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemeriksaan Kerugian Negara;

- b. menyampaikan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan;
- c. membuat keputusan mengenai menyetujui/menolak tanggapan atas hasil pemeriksaan dari pihak yang diduga menyebabkan Kerugian Negara;
- d. memperbaiki hasil pemeriksaan berdasarkan hasil tanggapan dari pihak yang diduga menyebabkan Kerugian Negara;
- e. membuat keputusan mengenai kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai atau bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara;
- f. melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi atas laporan hasil pemeriksaan yang tidak disetujui oleh pejabat yang membentuknya;
- g. membuat dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya; dan
- h. mengadministrasikan dan menatausahakan dengan baik atas dokumen pemeriksaan Kerugian Negara yang dilaksanakan.

Pasal 12

- (1) TPKN melaksanakan kegiatan pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara dengan membuat daftar pertanyaan;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara; dan
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Bukan Bendahara yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara.

- (2) Daftar Pertanyaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan secara tertulis kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (4) Penyampaian hasil pemeriksaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan:
 - a. secara langsung dengan pemanggilan orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; atau
 - b. melalui pengiriman surat lewat Kantor Pos ke alamat terakhir orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dengan bukti pengiriman surat dimaksud.
- (5) Tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dapat disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (6) Keputusan TPKN atas tanggapan hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang disampaikan orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara, TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan;
 - b. dalam hal TPKN menolak tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara, TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan;
 - c. dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan atas kekayaan negara disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara; atau
 - b. kekurangan atas kekayaan negara bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya Kerugian Negara; dan
 - b. jumlah Kerugian Negara.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan bukti pendukung dokumen untuk penyelesaian Kerugian Negara sebagai berikut:
 - a. Kerugian Negara akibat berkurangnya barang milik negara, dokumen pendukung yang dibutuhkan dengan melampirkan fotokopi:
 - 1) surat izin pemegang dan/atau penanggung jawab barang milik negara;
 - 2) berita acara serah terima barang milik negara;
 - 3) perhitungan jumlah Kerugian Negara yang harus dibayarkan;
 - 4) surat laporan Kepolisian;
 - 5) surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Kepolisian; dan
 - 6) berita acara pemeriksaan.

- b. Kerugian Negara akibat pelanggaran kontrak kerja atau ikatan dinas, dokumen pendukung yang dibutuhkan dengan melampirkan fotokopi:
 - 1) Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
 - 3) Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - 4) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
 - 5) Surat perjanjian ikatan dinas/pemberian tugas belajar;
 - 6) Perhitungan jumlah Kerugian Negara yang harus dibayarkan; dan
 - 7) Berita acara pemeriksaan.
- (7) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 6) dan huruf b angka 7) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan, menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN, sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (9) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui, PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan oleh PPKN segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (10) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (8), TPKN melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.

- (11) Pelaksanaan penugasan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), TPKN melakukan:
- a. TPKN melaksanakan kegiatan penugasan pemeriksaan ulang Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hanya yang berhubungan erat dengan materi pemeriksaan yang tidak disetujui PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan.
 - b. TPKN setelah melaksanakan kegiatan penugasan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a membuat laporan hasil pemeriksaan dengan memperbaiki/merevisi materi atas laporan hasil pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
 - c. TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada pejabat yang membentuknya, untuk mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (12) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c disetujui, pejabat yang diberi kewenangan oleh PPKN segera menyampaikan laporan kepada PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui.

Bagian Keempat
Penentuan Nilai Kerugian Negara

Pasal 14

- (1) Nilai Kerugian Negara merupakan unsur yang menentukan dalam rangka menetapkan besarnya beban yang harus ditanggung oleh pihak yang mengakibatkan timbulnya Kerugian Negara.

- (2) Dalam hal penyelesaian Kerugian Negara, maka perlu dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. kekayaan negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Dalam hal penentuan nilai Kerugian Negara, petunjuk pelaksanaannya sebagai berikut:
 - a. penentuan nilai Kerugian Negara didasarkan pada:
 - 1) nilai buku, merupakan nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset tersebut; atau
 - 2) nilai wajar atas barang yang sejenis, merupakan estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.
 - b. penentuan nilai ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya.
 - c. dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai Kerugian Negara atas barang milik negara atau aset tersebut menggunakan nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

d. Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) ditentukan dengan petunjuk sebagai berikut:

1) Kerugian Negara berupa uang

Penentuan nilai Kerugian Negara berupa uang ditetapkan berdasarkan pembukuan dan/atau dokumen keuangan dan/atau dokumen keuangan lainnya dan/atau surat perjanjian dan/atau kontrak dan/atau catatan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Kerugian Negara berupa surat berharga

Penentuan nilai Kerugian Negara berupa surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, *travel cheque*, dan wesel ditetapkan berdasarkan nilai nominal yang tercantum pada surat berharga tersebut.

Sedangkan besarnya Kerugian Negara berupa surat berharga dalam bentuk saham atau obligasi ditetapkan berdasarkan nilai wajar pasar pada saat kejadian.

3) Kerugian Negara berupa barang

Penentuan nilai Kerugian Negara berupa barang ditetapkan berdasarkan harga pada saat barang dimaksud hilang/rusak.

Bagian Kelima

Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara

Paragraf 1

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

Pasal 15

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh PPKN, maka PPKN segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan.

- (2) Dalam hal pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (7) Daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disampaikan dalam surat pernyataan jaminan.

- (8) Surat pernyataan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Format surat penetapan perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara tersebut;

- b. adanya jaminan aset dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang nilainya melebihi dari besaran Kerugian Negara tersebut;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Negara;
- (7) Kepala Satker/Atasan Kepala Satker mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji/tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (8) Dalam hal pihak yang merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, maka Bendahara Satker Pihak Yang Merugikan dalam membuat SKPP mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Negara.
- (9) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang disampaikan kepada PPKN melalui pejabat lain yang diberi kewenangan.
- (10) Format surat permohonan perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (11) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memuat paling sedikit:
- a. jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. kondisi/alasan mengajukan permohonan penambahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (12) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sejak Laporan Hasil Pemeriksaan disetujui oleh PPKN.
- (13) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyampaikan penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang mengajukan permohonan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima.
- (14) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu yang ditetapkan, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
- (15) PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (16) Pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM dilaksanakan dengan meneliti bukti setor pembayaran sesuai dengan SKTJM yang disampaikan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan catatan pembayaran di kartu piutang Tuntutan Ganti Kerugian.
- (17) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran melewati 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pembayaran yang diperjanjikan dalam SKTJM, PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan menyampaikan teguran tertulis.

- (18) Format Surat Teguran Kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (17) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (19) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sampai 1 (satu) bulan sebelum melebihi waktu yang diperjanjikan sebagaimana tertulis pada SKTJM berakhir maka kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris diberikan surat teguran tertulis terakhir dengan memberikan pernyataan bahwa bila tidak memenuhi kewajiban pembayaran maka akan diterbitkan Surat Penagihan (SPn).
- (20) Format Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (19) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 17

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN.
- (2) PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan SKP2KS yang memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;

- d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Format SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dengan surat tanda terima.

Pasal 18

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 19

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dianggap telah menerima atas SKP2KS.

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk Surat Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan dengan disertai bukti.
- (4) Format Surat Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.
- (6) PPKN dalam menyelesaikan Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, disampaikan ke Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara untuk diperiksa dan mendapatkan pertimbangan atau pendapat mengenai penyelesaian Kerugian Negara dimaksud.
- (7) Pertimbangan atau pendapat mengenai penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam hal:
 - a. penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS tidak dipenuhi atau melewati batas waktu pembayaran;
 - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menerima atau tidak mengajukan keberatan SKP2KS atau mengajukan keberatan SKP2KS.

Paragraf 3

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian dengan melaksanakan tuntutan ganti kerugian berdasarkan laporan hasil verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara, PPKN membentuk Majelis.

- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang, yang terdiri atas :
 - a. Sekretaris Jenderal sebagai Ketua;
 - b. Inspektur Jenderal sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai Sekretaris;
 - d. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagai Anggota; dan
 - e. Inspektur Wilayah yang ditunjuk berjumlah 1 (satu) orang sebagai Anggota.
- (3) Pembentukan Majelis bersifat sementara.
- (4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan mempercepat penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara.
- (5) Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. Pejabat/Pegawai pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua;
 - b. Pejabat/Pegawai pada Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai Sekretaris; dan
 - c. Pejabat/Pegawai dari unsur Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai Anggota.
- (6) Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas membantu Majelis dalam pengadministrasian penyelesaian Kerugian Negara.
- (7) Kerja Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 1 (satu) tahun.

- (8) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 22

- (1) Majelis melakukan sidang dalam melaksanakan tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN atas:
- a. penyelesaian atas kekurangan kekayaan negara bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara;
 - b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi; dan
 - c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS.
- (2) Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan Kekayaan Negara bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 23

- (1) Sidang Majelis merupakan sidang pembuktian bahwa kekurangan kekayaan negara bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Bukan Bendahara.

- (2) Hasil sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Hasil sidang terbukti bahwa kekurangan Kekayaan Negara bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai Bukan Bendahara:
 - 1) Majelis menetapkan putusan hasil sidang berupa pertimbangan penghapusan Kekayaan Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
 - 2) Pertimbangan penghapusan kekayaan negara disampaikan kepada PPKN;
 - 3) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2), PPKN mengusulkan penghapusan kekayaan negara dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara;
 - 4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Hasil sidang terbukti bahwa kekurangan kekayaan negara disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai Bukan Bendahara:
 - 1) Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali;
 - 2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali;
 - 3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1), TPKN melalui PPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis;

- 4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 3) menyatakan bahwa kekurangan Kekayaan Negara disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara, atau kekurangan Kekayaan Negara bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara disertai dengan dokumen pendukung;
- 5) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud pada angka 4) di atas atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud pada angka 4);
- 6) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada angka 5) disampaikan kepada PPKN;
- 7) PPKN menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada angka 5) melalui proses penyelesaian Kerugian Negara dengan penerbitan SKTJM dan SKP2KS;
- 8) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud pada angka 4), Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan kekayaan negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
- 9) Putusan sebagaimana dimaksud pada angka 8) disampaikan kepada PPKN;

- 10) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada angka 8), PPKN mengusulkan penghapusan kekayaan negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara;
 - 11) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sidang untuk Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi:
- a. Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - 1) memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - 2) memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara/kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan/atau
 - 3) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
 - b. Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
 - c. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (4) Sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris:
- a. Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- 1) memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN;
 - 2) memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM; dan/atau
 - 3) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- b. Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a, Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (5) Sidang penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- a. Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- 1) memeriksa laporan TPKN;
 - 2) memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - 3) memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - 4) meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - 5) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- b. Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
- 1) menolak seluruhnya;
 - 2) menerima seluruhnya; atau
 - 3) menerima atau menolak sebagian.
- c. Dalam hal sidang, Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.

- d. Berdasarkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2KS, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
 - e. Berdasarkan SKP2KS, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKN untuk melakukan:
 - 1) pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - 2) penghapusan kekayaan negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara.
 - f. Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPKN melakukan:
 - 1) menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - 2) mengusulkan penghapusan kekayaan negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara.
- (6) Format surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f angka 1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Keuangan

Pasal 24

- (1) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K merupakan surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Bukan Bendahara.

- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh PPKN berdasarkan putusan Majelis yang menyampaikan pertimbangan kepada PPKN untuk menerbitkan SKP2K dalam:
 - a. Sidang untuk Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi;
 - b. Sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; dan
 - c. Sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) SKP2K Bagi Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) SKP2K Bagi Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) SKP2K yang diterbitkan berdasarkan putusan Majelis dalam sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan

- e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan.
- (6) SKP2K yang diterbitkan berdasarkan putusan Majelis dalam sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas.
- (7) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan.
- (8) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, dengan menggunakan tanda terima.

- (9) PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.
- (10) SKP2K mempunyai hak mendahului, dalam hal:
 - a. apabila Pegawai bukan Bendahara disamping mengakibatkan Kerugian Negara juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, maka prioritas pengembalian adalah pengembalian/pemulihan Kerugian Negara.
 - b. mendudukan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

BAB III

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 25

- (1) Berdasarkan putusan Majelis yang memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan atas SKP2KS dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKN untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKN:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:

- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau uang dan/atau barang bukan milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan
 - d. PPKN yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 26

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara terhadap pegawai bukan bendahara yang karena perbuatan melawan hukum dan/atau lalai, yang mengakibatkan Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM;
 - b. SKP2KS; atau
 - c. SKP2K.
- (2) Tata cara penagihan untuk memulihkan Kerugian Negara dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat penagihan (SPn) atas nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara tersebut;
 - b. Surat penagihan diterbitkan oleh PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan;
 - c. Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara;
 - d. Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diterbitkan dengan ketentuan:
 - 1) SPn Pertama merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satker untuk penagihan pertama piutang PNBK kepada pihak terutang yakni Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- 2) SPn Kedua, merupakan yang diterbitkan oleh Kepala Satker apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPn Pertama pihak terutang yakni Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum melunasi piutang PNBP;
- 3) SPn Ketiga, merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satker apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada Surat penagihan kedua pihak terutang yakni Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum melunasi piutang PNBP.

Pasal 27

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL).
- (2) SKTL ditandatangani oleh PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) SKTL paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan

- e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal SKTL diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
 - (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian SKTL kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
 - (6) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyeteroran ganti Kerugian Negara; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.
 - (7) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (8) Surat permohonan pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGHAPUSAN

Pasal 28

- (1) Atas dasar SKTL, PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. kekayaan negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN TAGIHAN NEGARA DAN
SETORAN

Pasal 29

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara kepada PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan apabila diketahui jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan sesuai SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;

- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara wajib menyampaikan bukti pendukung mengenai adanya kelebihan jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih.
- (3) Dalam hal PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan telah menerima permohonan pengurangan tagihan negara, PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan melakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud beserta bukti pendukung adanya kelebihan jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan dimaksud, PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan melaksanakan pengembalian kelebihan jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG

Pasal 30

- (1) Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara Kepada Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutang, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo piutang dan upaya penagihan yang telah dilakukan, namun penagihan piutang Kerugian Negara tidak membawa hasil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SKP2K diterbitkan yang dinyatakan wanprestasi.

- (2) Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menangani piutang negara.

BAB VIII

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 31

Keadaan kahar (*force majeure*) merupakan kejadian-kejadian yang dapat terjadi sewaktu-waktu, tidak dapat diduga dan berada di luar kemampuan manusia dengan segala daya serta upaya untuk mengatasinya.

Pasal 32

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain bencana alam, huru-hara (kerusuhan massal), kebakaran dan kejadian di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan.
- (2) Dalam hal terjadinya Kerugian Negara karena keadaan kahar (*force majeure*), proses penyelesaiannya dilakukan dengan penghapusan.
- (3) Penyelesaian Keadaan Kahar (*force majeure*)
 - a. Menteri mengusulkan penghapusan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam keadaan kahar (*Force Majeure*) kepada Menteri Keuangan.
 - b. Usulan penghapusan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud, dilakukan setelah melalui penelitian yang dilaksanakan oleh TPKN atau Tim *Ad Hoc* PKN Provinsi.

BAB IX
KEDALUWARSA

Pasal 33

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia dan Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKN mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB X
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.
- (2) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XI
SANKSI

Pasal 35

Pegawai Bukan Bendahara yang melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja dan/atau lalai yang mengakibatkan Kerugian Negara, dapat dikenai:

- a. sanksi administratif berupa mengganti Kerugian Negara dan sanksi disiplin pegawai; dan/atau
 - b. sanksi pidana,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
TATA CARA PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Penatausahaan Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 36

- (1) Pada tingkat instansi vertikal terjadi Kerugian Negara Kepala Satker menugaskan pejabat yang berada di bawahnya untuk menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Pada tingkat kantor pusat terjadi Kerugian Negara pejabat eselon I menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara.
- (3) Pada Tingkat Lembaga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri melalui Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menyiapkan bahan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan masalah ganti kerugian dan penagihan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Bagian Kedua
Penatausahaan Kerugian Negara

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian Negara, setiap Kepala Satker di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional wajib melaksanakan penatausahaan berkas Kerugian Negara yang ada pada unitnya secara tertib, teratur dan kronologis.
- (2) Mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara berdasarkan tembusan laporan yang diterimanya dari Kepala Satker domisili baru.
- (3) Kepala Satker domisili baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. membuat “Daftar Kerugian Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atas nama pegawai/debitur bersangkutan.
 - b. mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara bersangkutan dalam daftar Kerugian Negara.
 - c. melaporkan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada Menteri dengan tembusan kepada:
 - 1) Sekretaris Jenderal;
 - 2) Inspektur Jenderal;
 - 3) Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - 4) Atasan Langsung Kepala Satker bersangkutan; dan
 - 5) Kepala Satker tempat terjadinya Kerugian Negara.
- (4) Dalam Hal Pegawai Bukan Bendahara pindah ke instansi lain belum menyelesaikan Kerugian Negara, penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kewajiban Satker tempat terjadinya Kerugian Negara melakukan:
 - 1) membuat daftar Kerugian Negara.

- 2) memberitahukan kepindahan tersebut kepada Kepala Satker yang baru dengan menggunakan surat pemberitahuan tembusan kepada :
 - a) Menteri;
 - b) Sekretaris Jenderal;
 - c) Inspektur Jenderal; dan
 - d) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara pada domisili lama dan baru.
 - 3) mencatat kepindahan dimaksud di dalam lajur keterangan pada daftar Kerugian Negara.
 - 4) mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara yang dilaksanakan pada Satker yang baru berdasarkan tembusan laporan yang diterimanya dari Kepala Satker yang lama.
- b. Kewajiban Satker yang baru :
- 1) membuat daftar Kerugian Negara atas nama pegawai yang bersangkutan.
 - 2) mencatat tindak lanjut Kerugian Negara atas nama pegawai yang bersangkutan.
 - 3) melaporkan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada kepala Satkernya dengan tembusan kepada :
 - a) Menteri;
 - b) Sekretaris Jenderal; dan
 - c) Inspektur Jenderal.
- (5) Dalam Hal Pegawai Bukan Bendahara kembali ke instansi asal belum menyelesaikan kerugian, penyelesaian Kerugian Negara dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Kepala Satker membuat daftar Kerugian Negara;
 - b. Kepala Satker mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara;
 - c. Membuat berita acara penyerahan penyelesaian Kerugian Negara;

- d. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepala Satker asal terkait Kerugian Negara dengan melampirkan dokumen/surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan Kerugian Negara;
- e. Kepala Satker/instansi asal melakukan pemotongan gaji/tunjangan kepada pegawai yang melakukan Kerugian Negara;
- f. Kepala Satker/instansi asal mengirimkan bukti pemotongan kepada Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- g. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara melaporkan bukti pemotongan kepada TPKN.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.
2. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang sebelumnya.
3. Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian Kerugian Negara terhadap pegawai bukan bendahara dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2019

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 946

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan
Hubungan Masyarakat,


Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.
NIP. 19630817 198503 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT SURAT PERINTAH VERIFIKASI

SURAT PERINTAH

NOMOR:.....

Dalam rangka melaksanakan tugas verifikasi, kami memerintahkan:

Nama/NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

(ditambahkan apabila yang ditugaskan lebih dari 1 (satu) orang)

untuk melaksanakan verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara yang diketahui berdasarkan hasil
(sebutkan mengenai sumber informasi terjadinya kerugian negara berdasarkan hasil laporan/pengawasan, surat Nomor/tanggal/perihal, bentuk kerugian negara akibat berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara) mulai tanggal s.d
.....

Surat Perintah ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, agar segera menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud. Kepada pihak terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan perintah tersebut.

.....,
Kepala Satuan Kerja,

.....
NIP

Tembusan:

1.
2.
3. dan seterusnya.

*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

A. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN NEGARA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain, Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut TPKN;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional, Tim Penyelesaian Kerugian Negara bertugas menyelesaikan kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Bukan Bendahara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran

- Mençingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5934);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Bukan Bendahara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu PPKN dalam proses penyelesaian kerugian negara terhadap Pegawai Bukan Bendahara.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

.....

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1. NIP	Ketua, merangkap Anggota
2. NIP	Wakil Ketua, merangkap Anggota
3. NIP	Sekretaris, merangkap Anggota
4. NIP	Anggota
5. NIP	Anggota
6. NIP	Anggota

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

.....

B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA KANTOR WILAYAH.../KANTOR PERTANAHAN....

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA
KANTOR WILAYAH.../KANTOR PERTANAHAN....
TAHUN ANGGARAN

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain, Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut TPKN;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Tim Penyelesaian Kerugian Negara bertugas menyelesaikan kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Bukan Bendahara di Lingkungan Kantor Wilayah ... /Kantor Pertanahan
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Bukan Bendahara Kantor Wilayah.../Kantor Pertanahan.... Tahun Anggaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA KANTOR WILAYAH..../ KANTOR PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Bukan Bendahara Kantor Wilayah / Kantor Pertanahan Tahun Anggaran yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu PPKN dalam proses penyelesaian kerugian negara terhadap Pegawai Bukan Bendahara.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah / Kantor Pertanahan Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

an. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KEPALA KANTOR WILAYAH/
KEPALA KANTOR PERTANAHAN

.....

NIP.

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN
NEGARA TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA
KANTOR WILAYAH..../KANTOR PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA
KANTOR WILAYAH/KANTOR PERTANAHAN

TAHUN ANGGARAN

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1. NIP.	Ketua
2. NIP.	Sekretaris
3. NIP.	Anggota
4. NIP.	Anggota
5. NIP.	Anggota

an. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KEPALA KANTOR WILAYAH/
KEPALA KANTOR PERTANAHAN

.....
NIP.

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT DAFTAR PERTANYAAN KERUGIAN NEGARA

NAMA SATUAN KERJA *)			
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA			
No.	Pertanyaan	No.	Jawaban
1.	Bagaimana peristiwa kerugian negara dapat diketahui?	1.	
2.	Dengan cara bagaimana kerugian itu terjadi?	2.	
3.	Berapa jumlah berkurangnya uang, surat berharga, barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik	3.	
4.	Berapa nilai kerugian yang diderita oleh negara?	4.	
5.	Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira nilai kerugian itu?	5.	
6.	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian kerugian negara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut dalam melanggar hukum/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian negara itu?	6.	
7.	Apakah kejadian kerugian negara ini sudah dilaporkan kepada pihak Polisi atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? (jika ada dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan).	7.	
8.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu ?	8.	

9.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas mana negara dapat menuntut penggantian/ pembayaran kembali dari pihak ketiga tersebut ?	9.	
----	---	----	--

.....,

(TPKN)

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT SURAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Nomor : Tempat, tanggal bulan tahun
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan
Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Kepala Satuan Kerja
di

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas terjadinya kerugian negara akibat berkurangnya **) di lingkungan Satuan Kerja *).
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (terlampir) dengan Nomor tanggal perihal tersebut di atas, yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pegawai Bukan Bendahara atas nama Sdr/i NRP/NIP jabatan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan **) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp (*sebutkan dalam huruf*) yang disebabkan karena ***) dari Sdr/i
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami memohon pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud.
4. Demikian disampaikan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....

- *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.
**) Pilih salah satu: bentuk uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, sertasebutkan jenis dan jumlahnya.
***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA

NAMA SATUAN KERJA *)

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama/NIP :
- Jabatan :
2. Nama/NIP :
- Jabatan :
3. Nama/NIP :
- Jabatan :

selaku anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan Surat Keputusan Pembentukan TPKN Nomor tanggal telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama/NIP :

Jabatan :

Atas pertanyaan pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Apakah Saudara tahu kenapa dipanggil untuk diperiksa?
 2.
3. Coba jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara sampai dengan sekarang?
 3. Riwayat pendidikan formal
 - Riwayat pendidikan kedinasan
 - Riwayat pekerjaan

4. Coba jelaskan proses dan kapan uang/surat berharga/Barang Milik Negara dan/atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab, atau yang Saudara ketahui?

4

5. Coba jelaskan mengenai adanya selisih atau kekurangan jumlah uang/surat berharga/Barang Milik Negara dan/atau uang/barang bukan milik negara yang berada di bawah pengurusan atau tanggung jawab, atau yang Saudara ketahui?

5.....

6. (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya kesalahan/kelalaian yang bersangkutan)

6

7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan?

7.....

8. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan?

8. Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani oleh pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan yang diperiksa seperti di bawah ini

Yang diperiksa,

Pemeriksa,

Anggota TPKN

1.

2.

3.

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK UNTUK
PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :
Pangkat/Golongan :
Unit :
Alamat :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp.....(*..sebutkan dengan huruf ..*), yakni kerugian yang disebabkan

1. Jumlah kerugian negara tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke rekening Kas Negara di pada tanggal (*salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini*). *)
2. Jumlah kerugian negara tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke rekening Kas Negara di dalam jangka waktu**) dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp (*sebutkan dengan huruf****)) dengan menyerahkan jaminan berupa*)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

.....,

Mengetahui
Kepala Satuan Kerja

Meterai cukup

.....

(Nama penanggung jawab
kerugian negara)

Saksi-Saksi:

1.
2.

- *) 1. dan 2. coret yang tidak perlu
- **) Kerugian negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani/akibat kelalaian paling lama 24 bulan
- ***) Diisi angsuran tiap bulan untuk kerugian negara sebagai akibat kelalaian pembayaran pelunasan paling lama 24 bulan

B. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK BAGI PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor KTP :

Sebagai Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli waris dari pihak Penanggung Jawab Kerugian:

Nama/NRP/NIP :
Pangkat/Golongan :
Unit :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp (*sebutkan dengan huruf...*), yakni kerugian yang disebabkan:

1. Jumlah kerugian negara tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke rekening Kas Negara di pada tanggal (*salinan bukti setor dilampirkan bersama ini*). *)
2. Jumlah kerugian negara tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke rekening Kas Negara di dalam jangka waktu**), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp (*sebutkan dengan huruf****)) dengan menyerahkan jaminan berupa*)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

.....,

Mengetahui:

Kepala Satuan Kerja

meterai cukup

(Nama Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab
Kerugian Negara)

.....

Saksi-Saksi:

1.

2.

*) 1. dan 2. Coret yang tidak perlu

**) Kerugian negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani/akibat kelalaian paling lama 24 bulan.

***) Diisi angsuran tiap bulan untuk kerugian negara sebagai akibat kelalaian pembayaran pelunasan paling lama 24 bulan.

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT SURAT PERNYATAAN JAMINAN

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama /NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

dengan ini menyatakan :

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
 - a. Tanah (*sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain*);
 - b. Bangunan (*sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti pemilikan dan lain-lain*);
 - c. Barang bergerak (*sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain*);
 - d. Tagihan (*sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain*);
 - e. Surat-surat Berharga (*sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain*).Sebagai jaminan atas pengembalian kerugian negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp (*sebutkan dengan huruf*)

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama /NIP :
Pangkat Golongan :
Jabatan : (minimal Pejabat Eselon III)
Unit kerja :

Dengan disaksikan oleh :

a. Nama /NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit kerja :

b. Nama /NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit kerja :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.

4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh kerugian negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya berdasarkan kasus yang menjadi lampiran dari surat penyerahan jaminan ini.

5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah kerugian negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.

6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas jumlah kekurangan perbendaharaan/kerugian negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya/ahli waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas kerugian negara ini tidak mengesampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yang menerima penyerahan Jaminan,

Yang menyerahkan,

Meterai cukup

.....

.....

Saksi-saksi

1.

2.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT SURAT KUASA MENJUAL

NAMA SATUAN KERJA *)

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama /NIP : **)
Pangkat : **)
Jabatan : **)
Unit : **)
Alamat : **)

dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama /NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) dan dalam melakukan:

.....
.....
.....

Khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian kerugian negara.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

Yang menerima kuasa,

Yang memberi kuasa,

Meterai cukup

.....

.....

NIP.....

NIP.....

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.

***) NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Unit diisi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT SURAT PENETAPAN PERUBAHAN JANGKA WAKTU
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

Nomor : Tempat, tanggal bulan tahun
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Penetapan Perubahan Jangka Waktu
Pengembalian Kerugian Negara

Yth. Sdr/i

di.....

1. Rujukan Surat Nomor tanggal hal penyampaian permohonan perubahan jangka waktu pengembalian kerugian negara terjadi akibat kelalaian sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan memperhatikan alasan/kondisi dari Saudara dan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara, maka dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara mengenai perubahan jangka waktu pengembalian kerugian Negara dimaksud disetujui atau ditolak*)
3. Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

.....

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN JANGKA WAKTU
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

Nomor : Tempat, tanggal bulan tahun
Sifat :
Hal : Permohonan Perubahan Jangka Waktu
Pengembalian Kerugian Negara

Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
di

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dengan
Nomor tanggal perihal Laporan Hasil Pemeriksaan, yang
menyatakan bahwa saya:

Nama/NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan
.....*) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp
.....(*sebutkan dalam huruf*) dan kerugian negara dimaksud terjadi
akibat kelalaian saya.

Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti
Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, maka saya wajib
mengganti kerugian negara dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat)
bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya memohon perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi(*sebutkan dalam huruf*) bulan. Permohonan tersebut saya ajukan karena (*sebutkan alasan/kondisinya*). Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

.....
NIP.....

- *) Pilih salah satu: uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, serta sebutkan jenis dan jumlahnya.

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT SURAT TEGURAN KEPADA PIHAK YANG MERUGIKAN/
PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS

Nomor : Tempat, tanggal bulan tahun
Sifat :
Lampiran :
Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban
Pelunasan/Pembayaran Atas Piutang Kerugian
Negara

Yth. Sdr.....

di

1. Rujukan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara harus melakukan pelunasan/pembayaran atas piutang PNBPN sebesar Rp (sebutkan dengan huruf)
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa menurut penatausahaan piutang PNBPN kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas piutang PNBPN sebesar Rp (sebutkan dengan huruf) sesuai dengan tanggal jatuh temposebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi paling lambat tanggal dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami. Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn) kedua.**)
4. Demikian agar maklum.

Kepala Satuan Kerja

.....

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara
- ***) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sampai 1 (satu) bulan sebelum melebihi waktu yang diperjanjikan sebagaimana tertulis pada SKTJM berakhir.

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT SURAT PENAGIHAN

Nomor : Tempat, tanggal bulan tahun
Sifat :
Lampiran :
Hal : Surat Penagihan (SPn) SKTJM/SKP2KS/SKP2K **)

Yth. Sdr
di

1. Rujukan Surat Penagihan (SPn) SKTJM/SKP2KS/SKP2K **) Nomor, tanggal perihal
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan penatausahaan piutang PNBK kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas piutang PNHP sebesar Rp (*sebutkan dengan huruf*) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Surat Penagihan (SPn).
3. Oleh karena itu, diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara pada Bank/Pos Persero paling lambat tanggal dengan mencantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan (SPn) Kedua pada bukti setor berkenaan.
4. Apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar *fotocopy* bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Satuan Kerja

.....

Tembusan:

1. Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

***) Diisi sesuai dengan perihal

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
KEPADA SAUDARA PEGAWAI BUKAN BENDAHARA
PADA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor tanggal hal dinyatakan Saudara Pegawai Bukan Bendahara pada, terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan dengan nilai kerugian negara sebesar Rp, (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan karena dari Saudara
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara pegawai pada, telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah Rp (sebutkan dalam huruf) dengan tidak bersedia menyelesaikan kerugian negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp (sebutkan dalam huruf);
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor tanggal yang menyatakan bahwa SKTJM tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti

kerugian kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kepala Satuan Kerja tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara Pegawai Bukan Bendahara pada

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5934);
 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA PEGAWAI BUKAN BENDAHARA PADA

KESATU : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai pada sebesar Rp. (sebutkan dalam huruf).

- KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara pegawai pada mengganti kerugian negara sebesar Rp (sebutkan dalam huruf) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan kode akun 425791 dengan uraian Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini ditetapkan.
- KETIGA : Dalam harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara adalah
- KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini, Saudara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk mengganti kerugian negara.
- KELIMA : Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada. tanggal

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
KEPALA KANWIL /KEPALA KANTOR
PERTANAHAN

.....

Tembusan :

1.;
2.;
3. dst..

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SURAT KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)

Nomor : Tempat, tanggal bulan tahun
Sifat :
Lampiran :
Hal : Keberatan Atas Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara
di

Sehubungan dengan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor tanggal perihal
tersebut di atas, dengan ini saya:

Nama/NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan
.....**) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp
(sebutkan dalam huruf) dan kerugian negara disebabkan karena
.....**).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan
keberatan atas surat dimaksud dengan alasan dan terlampir bukti pendukung
keberatan saya.

Demikian permohonan saya, atas perhatiannya disampaikan
terima kasih.

Pemohon

(.....)

LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA SAUDARA PEGAWAI BUKAN BENDAHARA
PADA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Pegawai Bukan Bendahara pada, selaku penanggung jawab atas kekurangan sejumlah, telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah Rp (*sebutkan dalam huruf*) dengan tidak bersedia menyelesaikan kerugian negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor tanggal yang menyatakan bahwa SKTJM tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti kerugian kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b, telah ditetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang Kepada Saudara Pegawai Bukan Bendahara pada

- d. bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor tanggal perihal atas Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d, dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain serta ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, maka Majelis Penyelesaian Kerugian Tahun Anggaran telah mengadakan Sidang Majelis pada tanggal dengan risalah sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara Nomor tanggal
- f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara Tahun Anggaran memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara, pegawai pada, atas Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang dan terjadinya kekurangan yang berada dalam penguasaan Saudara Pegawai Bukan Bendahara pada bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Saudara Pegawai Bukan Bendahara pada
- g. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara Tahun Anggaran memberikan pertimbangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara Kepada Saudara pegawai pada atas kekurangan sejumlah, dan penghapusan kekurangan sejumlah, yang berada dalam penguasaan Saudara Pegawai Bukan Bendahara pada.....;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara Kepada Saudara Pegawai Bukan Bendahara pada

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5934);
 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tentang Tata Cara Tuntutan ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI BUKAN BENDAHARA PADA

KESATU : Membebaskan penggantian kerugian Negara kepada Saudara Pegawai Bukan Bendahara pada selaku penanggung jawab atas kekurangan dengan jumlah sebanyak

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja mengusulkan dan menyerahkan penghapusan yang berada dalam penguasaan Saudara Pegawai Bukan Bendahara pada kepada instansi yang mengurus penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penyerahan penagihan kepada PUPN atas kerugian negara yang mengalami kemacetan dilakukan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

LAMPIRAN XVI

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
NEGARA TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
(SKP2K) BAGI YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/
AHLI WARIS DINYATAKAN WANPRESTASI

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA
PEGAWAI BUKAN BENDAHARA PADA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara pegawai pada, selaku penanggung jawab, telah melanggar kewajibannya untuk
 - b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp, - (*sebutkan dalam huruf*);
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b, Saudara telah bersedia menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp, - (*sebutkan dalam huruf*) dengan penggantian ganti rugi menggunakan mekanisme angsuran dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung, dengan nilai angsuran sebesar Rp (*sebutkan dalam huruf*) perbulan;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf e sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yaitu tanggal, jumlah kerugian negara yang sudah dibayarkan Saudara adalah sebesar Rp, - (*sebutkan dalam huruf*);
 - e. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp....., - (*sebutkan dalam huruf*);
 - f. bahwa sehubungan dengan huruf e dan dalam rangka

menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan pertimbangan rekomendasi Majelis Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara Nomor tanggal terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

- g. bahwa untuk melakukan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud huruf f, dengan mengacu kepada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional perlu menerbitkan keputusan pembebanan penggantian kerugian kepada Saudara Pegawai Bukan Bendahara pada
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara Pegawai pada

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5934);
 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI BUKAN BENDAHARA PADA

KESATU : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai pada sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf).

KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian kerugian negara oleh Saudara Pegawai Bukan Bendahara pada sebesar Rp (sebutkan dalam huruf) sebagai angsuran, sehingga jumlah kerugian negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara pegawai pada sebesar Rp.....(sebutkan dalam huruf).

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja untuk menerbitkan Surat Penagihan (SPn) kepada Saudara pegawai pada sebesar Rp (sebutkan dalam huruf).

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja (diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara) untuk menyampaikan pendapat dan usul kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional paling lambat 7 (tujuh) hari setelah meneliti tembusan laporan kemacetan penagihan kerugian negara dari Kepala Satuan Kerja, agar penagihan atas kerugian negara yang mengalami kemacetan diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

KELIMA : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas kerugian negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

.....

Tembusan :

1.;
2.;
3. dst..

LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
(SKP2K) BAGI PIHAK YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH
HAK/AHLI WARIS DAPAT MENERIMA ATAU MENGAJUKAN KEBERATAN
ATAS SKP2KS

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA PEGAWAI BUKAN BENDAHARA PADA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Pegawai Bukan Bendahara pada, selaku penanggung jawab, telah melanggar kewajibannya untuk
- b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp,
(sebutkan dalam huruf);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara pegawai pada, telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah Rp,
(sebutkan dalam huruf) dengan tidak bersedia menyelesaikan kerugian negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor tanggal yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti kerugian kepada Saudara Pegawai Bukan Bendahara pada

- e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah ditetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kepala Satuan Kerja tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang kepada Saudara Pegawai Bukan Bendahara pada
- f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara mengajukan keberatan dengan surat Nomor tanggal hal/ tidak mengajukan keberatan*) atas Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang
- g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan pertimbangan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara Nomor tanggal; terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
- h. bahwa untuk melakukan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud huruf g, dengan mengacu kepada Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara perlu menerbitkan keputusan pembebanan penggantian kerugian kepada Saudara Pegawai Bukan Bendahara pada
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Kepada Saudara Pegawai Bukan Bendahara pada

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5934);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI NEGERI PADA

KESATU : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara Pegawai Negeri pada sebesar Rp.....,- (*sebutkan dalam huruf*).

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja untuk menerbitkan Surat Penagihan (SPn) kepada Saudara Pegawai Negeri pada, sebesar Rp.....,- (*sebutkan dalam huruf*).

KETIGA : Memerintahkan kepada untuk menyampaikan pendapat dan usul kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional paling lambat 7 (tujuh) hari setelah meneliti tembusan laporan kemacetan penagihan kerugian negara dari Kepala Satuan Kerja, agar penagihan atas kerugian negara yang mengalami kemacetan diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas kerugian negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Memerintahkan kepada Saudara Pegawai pada, untuk memulihkan kerugian negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini.

KEENAM : Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; *)
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
5. Saudara pegawai pada, untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

.....

- *) Pilih salah satu Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengajukan keberatan atau tidak atas SKP2KS.

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

SURAT KETERANGAN LUNAS

Nomor : SKTL/Nomor/Bulan/Tahun/Kodesatker

Kepala (*Satuan Kerja **) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp (*sebutkan dengan huruf*) atas nama Sdr, yang berdasarkan Surat Nomor tanggal **), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal nomor ***) telah dibayar lunas.

Sehubungan dengan Sdr, telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/pengembalian harta kekayaan yang disita. ****)

Kepala Kantor/Satuan Kerja

(.....)

NIP.....

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
3. DJKN Kementerian Keuangan RI;
4. :
5. dan seterusnya ; dan
6. Saudara..... (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris)

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K

***) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

****) Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/ pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

LAMPIRAN XIX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
NEGARA TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SITA ATAS HARTA KEKAYAAN

Nomor : Tempat, tanggal bulan tahun
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan a.n.....**)

Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
di

1. Rujukan Surat Keterangan Lunas Nomor SKTL/ Nomor/ Bulan/ Tahun/ Kodesatker, tanggal perihal
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa nama NIP/NRP**), telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp (*sebutkan dengan huruf*), (terlampir SKTL).
3. Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n nama NIP/NRP**) oleh Saudara sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) Nomor tanggal dengan Berita Acara Penyitaan Nomor tanggal, dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n Sdr**) untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Sdr**)
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja

.....

*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Isi nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

***) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKP2KS, atau SKP2K,

****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan, penerbitan SPn,

Lampiran I sampai dengan Lampiran XIX merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL